

## *Ketika Tambang Mulai Diprotes Masyarakat*

Keberadaan tambang di beberapa daerah mulai menuai protes masyarakat. Kali ini Sulawesi Utara mencatat maraknya protes terhadap aktivitas tambang yang dianggap tidak membawa perbaikan kesejahteraan signifikan pada masyarakat di provinsi tersebut.

Bahkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara mendukung penolakan masyarakat terhadap kehadiran bentuk pertambangan yang hadir di Sulut. Hal ini dikatakan anggota DPRD Sulut James Sumendap kepada sejumlah wartawan Selasa (22/11).

Pernyataan itu disampaikan menyikapi sejumlah aksi demo masyarakat yang menuntut penghentian aksi pertambangan di sejumlah daerah Sulut. Menurutnya, alasan yang memicu penolakan pertambangan selain masalah kerusakan lingkungan, juga pertambangan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Bagaimanapun kami ingin ada perbaikan. Kami ingin masyarakat di daerah yang lebih menikmati hasil dari pertambangan itu. Karena apa gunanya kalau pertambangan itu tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat," katanya.

Dia mencontohkan PT MSM di Minahasa Utara (Minut) serta PT SEJ di Minahasa Selatan (Minsel), dana yang ke provinsi minim, sebaliknya dana yang lari ke pusat begitu besar. Dirinya juga sudah mendorong DPRD Sulut untuk menyurati Pemprov terkait aspirasi masyarakat ini.

"Kami minta segala aktivitas pertambangan di Sulut semuanya dihentikan, mengingat sudah ada kebijakan nasional untuk meninjau kembali berbagai kontrak pertambangan," ungkapnya.

Hal serupa disampaikan koleganya sesama legislator DPRD Sulut Benny Rhamdani. Ditegaskan Rhamdani, selama ini masyarakat di daerah terlalu banyak dirugikan, tidak sebanding dengan keuntungan yang didapati pusat.

"Dari sekian tahun sejumlah perusahaan yang beroperasi mengeksplorasi kekayaan alam, sudah berapa besar hasil yang dinikmati warga Sulut? Padahal hasil yang diambil banyak," ujarnya.

Dia menambahkan pula bahwa pengambilan kekayaan yang sebenarnya bisa menyejahterakan rakyat, hanya dinikmati oleh pihak asing dan segelintir pihak saja. Kebijakan pemerintah pusat yang melegalkan pertambangan tanpa mendengar keberatan masyarakat lokal kata dia, justru menimbulkan pergolakan masyarakat.

Ditambahkannya, jika paradigma ini tidak diubah dari sekarang untuk menyejahterakan rakyat, dan sistem "perampokan" seperti ini masih berlangsung terus, maka akan terus muncul benih-benih pergerakan rakyat baik yang menginginkan untuk memisahkan diri dari NKRI, juga akan muncul pergerakan lokal yang menentang pemerintahan yang berkuasa.

"Negara tidak bisa menyalahkan warga, sebab tuntutan yang seperti itu sebenarnya adalah situasi dan kondisi yang diciptakan negara sendiri, karena gagal menyejahterakan masyarakatnya," tegasnya.

Diketahui, sejumlah perusahaan pertambangan kini masih dan bakal beroperasi di Sulut. Sebelumnya PT Newmont Minahasa Raya (NMR) sudah selesai mengurus kekayaan emas di Ratatotok Minahasa Tenggara.

Kemudian hadir perusahaan PT Meares Sopotan Mining yang segera beroperasi di Minahasa Utara. Ada juga PT Sumber Energi Jaya (SEJ) di Minahasa Selatan, PT Avoced Bolaang Mongondow (ABM) di Bolmong dan PT Meytha Perkasa Utama (MPU) di Bolmong Timur. Semua perusahaan tambang ini sempat ditolak keras masyarakat, namun akhirnya pengoperasiannya tetap berjalan karena sudah direstui pemerintah.